

**DAMPAK KEBIJAKAN PENERTIBAN KERAMBA JARING
APUNG TERHADAP MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT
DI WADUK JATILUHUR
(Studi Kasus: Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta)**

**THE IMPACT OF THE POLICY TO CONTROL FLOATING
NET CAGES ON COMMUNITY LIVELIHOODS IN THE
JATILUHUR RESERVOIR
(Case Study of Sukatani District, Purwakarta Regency)**

JURNAL

DISUSUN OLEH :

**M. AGHIA SOFA P.
4122.3.22.15.0014**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK PERENCANAAN DAN ARSITEKTUR
UNIVERSITAS WINAYA MUKTI
2024**

**DAMPAK KEBIJAKAN PENERTIBAN KERAMBA JARING
APUNG TERHADAP MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT
DI WADUK JATILUHUR
(Studi Kasus Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta)**

**THE IMPACT OF THE POLICY TO CONTROL FLOATING
NET CAGES ON COMMUNITY LIVELIHOODS IN THE
JATILUHUR RESERVOIR
(Case Study of Sukatani District, Purwakarta Regency)**

M. Aghia Sofa P

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ; Fakultas Teknik,
Perencanaan dan Arsitektur ; Universitas Winaya Mukti, Bandung
e-mail: maghiasofa26@gmail.com

Abstrak

Waduk merupakan perairan tawar buatan yang dibuat dengan cara membendung sungai tertentu dengan memiliki berbagai fungsi yaitu sebagai pencegah banjir, pembangkit tenaga listrik, penyalur air bagi kebutuhan irigasi pertanian, untuk kegiatan perikanan baik tangkap maupun budidaya keramba jaring apung. Salah satu waduk yang ada di Indonesia yaitu Waduk Jatiluhur (Ir. H. Juanda). Usaha budidaya ikan dengan keramba jaring apung (KJA) di Waduk Jatiluhur sudah dilakukan sejak tahun 1974 dan secara intensif baru mulai dilakukan sejak tahun 1986. Kegiatan budidaya ikan dengan keramba jaring apung (KJA) cukup menguntungkan dan ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar waduk yang tanah pertaniannya terendam oleh pembangunan waduk, meskipun pada akhirnya hanya sedikit dari mereka yang menjadi pemilik keramba jaring apung (KJA). Dari fenomena tersebut, seiring berjalannya waktu kapasitas tampung Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatiluhur mengalami *over capacity*. Pemerintah melakukan penertiban di empat kecamatan, yakni Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Maniis, dan Kecamatan Sukatani. Penertiban ini tentunya akan berimbas pada petani keramba jaring apung (KJA), yaitu hilangnya mata pencaharian sebagian petani yang terkena imbas penertiban keramba jaring apung (KJA). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan kuantitatif dan Kualitatif. Metode penelitian ini mengkombinasikan kelebihan dari metode kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan untuk menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini yaitu terjadi pergeseran mata pencaharian para petani keramba jaring apung (KJA) merupakan imbas dari proses penertiban keramba jaring apung (KJA) oleh pemerintah karena dianggap melanggar dan melebihi kapasitas tampung. Adanya penolakan atau protes dari sebagian para petani yang diwawancarai dan menganggap bahwa proses penertiban keramba jaring apung (KJA) tidak adil khususnya untuk masyarakat lokal yang mempunyai keramba jaring apung (KJA) di Waduk Jatiluhur. Banyak masyarakat beralih profesi pekerjaan yang erat kaitannya dengan Waduk Jatiluhur dalam hal ini kegiatan budidaya ikan dengan keramba jaring apung, pekerja/buruh di tempat wisata sekitar Waduk Jatiluhur dan jasa perdagangan di sekitar Waduk Jatiluhur.

Kata Kunci: Keramba Jaring Apung, Pergeseran, Daya Dukung Daya Tampung, SWOT

Abstract

Reservoirs are artificial fresh waters made by damming certain rivers with various functions, namely as flood prevention, power generation, water supply for agricultural irrigation needs, for fishery activities both capture and floating net caramba cultivation. One of the reservoirs in Indonesia is Jatiluhur Reservoir (Ir. H. Juanda). Fish farming business with floating net cages (KJA) in Jatiluhur Reservoir has been carried out since 1974 and intensively has only been carried out since 1986. Fish farming activities with (KJA) are quite profitable and contribute to the economy of the community around the reservoir whose agricultural land is submerged by the construction of the reservoir, although in the end only a few of them become (KJA) owners. From this phenomenon, over time the capacity of (KJA) in Jatiluhur Reservoir experienced Over Capacity. The government regulates four sub-districts, namely Tegalwaru District, Sukasari District, Maniis District, and Sukatani District. This regulation will certainly have an impact on (KJA) farmers, namely the loss of livelihoods of some farmers affected by (KJA) regulation. This research approach uses quantitative descriptive research methods. Quantitative descriptive research is a method that aims to make an objective picture or descriptive of a situation using numbers, starting from data collection, interpretation of the data, and appearance and results. The result of this study is that there is a shift in the livelihood of (KJA) farmers as a result of the (KJA) regulation process by the government because it is considered to violate and exceed the capacity of the reservoir. There was rejection or protest from some farmers interviewed and considered that the (KJA) regulation process was unfair, especially for local communities who had (KJA) in Jatiluhur Reservoir. Many people switch professions that are closely related to the Jatiluhur Reservoir in this case fish farming activities with floating net cages, workers / laborers in tourist attractions around the Jatiluhur Reservoir and trading services around the Jatiluhur Reservoir.

Keywords: Floating Net Cage, Shift, Carrying Capacity, SWOT

1. PENDAHULUAN

Waduk Jatiluhur merupakan salah satu waduk buatan yang ada di Jawa Barat. Waduk ini digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti irigasi, pasokan air baku, PLTA, pariwisata, dan bahkan untuk kegiatan budidaya perikanan dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Keramba Jaring Apung (KJA) adalah tempat pemeliharaan ikan yang terbuat dari bahan jaring yang dapat menyebabkan keluar masuknya air dengan leluasa, sehingga terjadi

pertukaran air dari dan ke perairan sekitarnya serta pembuangan limbah atau sisa-sisa proses pemberian pakan dengan mudah. Usaha budidaya ikan dengan keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur sudah dilakukan sejak tahun 1974 dan secara intensif baru mulai dilakukan sejak tahun 1986. Kegiatan budidaya ikan dengan keramba jaring apung cukup menguntungkan dan ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar waduk yang tanah pertaniannya terendam oleh pembangunan waduk,

meskipun pada akhirnya hanya sedikit dari mereka yang menjadi pemilik Keramba Jaring Apung (KJA), namun dengan menjadi buruh berarti mereka memiliki pendapatan bulanan yang tetap. Berdasarkan dari data terakhir tahun 2022, terdapat 46.270 petak Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di Waduk Jatiluhur. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.31/2019 tentang keramba jaring apung jumlah ideal keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur sebanyak 11.306 petak.

Penelitian mengenai keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur sudah ada dilakukan sebelumnya seperti penelitian (Adam Kusumah et al., 2018), yang meneliti bahwa dengan adanya Waduk Jatiluhur memberikan eksternalitas positif bagi masyarakat Kecamatan Jatiluhur karena dengan adanya Waduk Jatiluhur memberikan manfaat sosial lebih besar dari biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat maupun pengelola bendungan. Penelitian lainnya yaitu mengenai eksternalitas produksi keramba jaring apung Waduk Jatiluhur (Deswati & Adrison, 2019) dan menyebutkan bahwa eksternalitas pakan memberikan pengaruh yang

positif kepada produktivitas budidaya Keramba Jaring Apung (KJA). Tetapi dalam fakta di lapangan keramba jaring apung Waduk Jatiluhur sudah melebihi daya dukung waduk, seperti penelitian (Fitri et al., 2017) yang menyebutkan perlunya dilakukan pengurangan dan atau pembatasan jumlah petakan keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur agar meminimalkan tingkat pencemaran perairan akibat kandungan fosfat.

Meskipun sudah banyak studi mengenai keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur baik eksternalitas positif atau negatif yang ditimbulkan oleh keramba jaring apung tersebut, perlu juga mengkaji penelitian mengenai pergeseran mata pencaharian masyarakat yang terdampak oleh penertiban keramba jaring apung. Fenomena yang berkembang di Waduk Jatiluhur pada akhir tahun 2022 terdapat penertiban terkait keramba jaring apung oleh Jasa Tirta II berkolaborasi dengan Satgas Citarum Harum dan Pemda Kabupaten Purwakarta secara bertahap dan berkelanjutan. Penertiban keramba jaring apung difokuskan di tiga zona yaitu Kecamatan Sukatani, Sukasari, dan Jatiluhur. Berdasarkan data

terakhir di tiga zona tersebut terdapat 46.270 petak keramba jaring apung. Artinya jumlah keramba jaring apung sudah melampaui kemampuan waduk, sehingga berakibat pada penurunan kualitas mutu air, eutrofikasi, pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali, dan menimbulkan korosi pada pembangkit listrik. Hampir 75% keramba jaring apung yang ada di Waduk Jatiluhur akan terkena imbas penertiban keramba jaring apung tersebut dan akan menimbulkan dampak negatif bagi sosial ekonomi masyarakat yang mata pencahariannya bertumpu pada budidaya keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur. Berdasarkan data dari Komandan Sektor 14 Tim Citarum Harum, terdapat 80 hingga 90 keramba jaring apung yang ditertibkan di Waduk Jatiluhur setiap hari pada bulan Oktober 2023. Tim Sektor 14 menargetkan membongkar 1.814 petak keramba jaring apung (Keramba Jaring Apung (KJA)). Penertiban dilakukan di empat kecamatan, yakni Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Maniis, dan Kecamatan Sukatani. Terdata 22.164 keramba jaring apung di empat kecamatan tersebut dengan jumlah pemilik

keramba jaring apung sebanyak 1.881 orang. Selain itu, risiko sosial yang terjadi berupa *culture shock* masyarakat akibat perubahan pola kehidupan, kohesifitas masyarakat menurun sehingga rentan terhadap konflik horizontal, hilangnya jaminan sosial, dan berbagai permasalahan demografi. Permasalahan demografi meliputi meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka putus sekolah, meningkatnya angka kriminalitas, dan mobilitas teritorial berupa migrasi masyarakat keluar daerah (Kurniasari et al., 2020).

Teknologi keramba jaring apung pertama kali diuji coba tahun 1974 dan mulai diusahakan tahun 1988. Awalnya, usaha ini diperuntukkan bagi warga yang terdampak pembangunan waduk. Namun, dalam perkembangannya, usaha keramba jaring apung berkembang pesat. Investor dari luar Purwakarta pun berdatangan untuk menanamkan modalnya. Dari data yang diberikan oleh Jasa Tirta II pada tahun 2015, terdapat 16.545 petak Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada zona perairan yang diperuntukkan bagi usaha perikanan, 12.160 petak di antaranya merupakan milik pengusaha

luar Purwakarta. Hanya 4.385 petak yang milik warga Purwakarta. Kondisi tersebut menjadi sesuatu yang ironi, karena warga lokal justru terpinggirkan. Dalam proses penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) ini diharapkan dapat dibarengi dengan kebijakan pembatasan jumlah kepemilikan maksimal petak untuk dapat mengatasi kesenjangan. Sebelumnya, pemodal besar membuat Keramba Jaring Apung (KJA) dalam jumlah puluhan hingga ratusan petak. Sementara warga lokal hanya mampu membuat belasan petak karena keterbatasan modal.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Mixed method research*. *Mixed method research* adalah pendekatan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Metode penelitian ini mengkombinasikan kelebihan dari metode kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan untuk menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Metode penelitian ini digunakan peneliti untuk menelaah

data secara mendalam di lapangan tentang bagaimana pergeseran mata pencaharian masyarakat di Waduk Jatiluhur yang terimbas oleh penertiban yang melibihi kapasitas tampung waduk dan dampak perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

2.1 Sumber Data

Data digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua, (Bagong dan Sutinah, 2005:55 dalam Andika 2016:7), yaitu:

A. Data Primer

Data primer merupakan data pertama dalam penelitian ini yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara yang didapatkan dari masyarakat yang terdampak penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada

seperti data di desa dan kecamatan berupa data penduduk, data pendidikan, data mata pencaharian, data BPS, website berita online, buku, jurnal dan skripsi penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang menjadi pendukung utama dalam proses penelitian ini.

2.2 Penentuan Sumber Informasi dan Responden Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Teknik penentu informan yang digunakan merupakan

Teknik *Purposive Sampling* digunakan atas berdasarkan penilaian peneliti akan pengetahuan calon informan tersebut untuk menjawab pertanyaan peneliti.

2.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan ada 3 (tiga), yaitu analisis daya dukung dan daya tampung waduk, identifikasi keberadaan Waduk Jatiluhur terhadap pendapatan di Waduk Jatiluhur, serta analisis pergeseran mata pencaharian masyarakat yang beraktivitas di Waduk Jatiluhur. Untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan data dan tujuan dari analisis tersebut dapat dilihat pada **Tabel 1** sebagai berikut.

Tabel 1 Metode Analisis

No	Tujuan	Data yang dibutuhkan	Metode Analisis	Output
1	Melihat Daya Dukung dan Daya Tampung Waduk Jatiluhur terhadap Keramba Jaring Apung	Data <i>Shapefile</i> (Pemetaan)	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Waduk Jatiluhur
2	Pergeseran Mata Pencaharian Masyarakat di Waduk Jatiluhur yang Terimbas oleh Penertiban yang Melibahi Kapasitas Tampung Waduk	<ul style="list-style-type: none"> • Data Kuesioner • Data Wawancara 	Analisis Eksploratif	Mengetahui bagaimana pergeseran pencaharian masyarakat di Waduk Jatiluhur yang terimbas oleh penertiban yang melibahi kapasitas tampung waduk
3	Membuat Strategi serta Arahan Kebijakan Terkait Kepemilikan Keramba Jaring Apung untuk Masyarakat Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Data Observasi Lapangan • Data Wawancara • Data Kuesioner 	Analisis SWOT	Membuat strategi serta arahan kebijakan terkait kepemilikan keramba jaring apung untuk masyarakat lokal

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kemampuan Lahan

Kecamatan Sukatani

Analisis Kemampuan Pengembangan yaitu untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai acuan untuk arahan kesesuaian lahan pada tahap selanjutnya. Pembuatan peta nilai kemampuan pengembangan lahan ini

yaitu dengan metode *superimpose* semua peta SKL yang telah dibuat dan melakukan penjumlahan nilai setiap satuan kemampuan lahan (SKL) dikalikan bobot setiap SKL. Setelah penjumlahan tersebut dilakukan, akan didapat nilai yang digunakan untuk penentuan kelas kemampuan pengembangan. Kriteria klasifikasi pengembangan dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Kriteria Klasifikasi Pengembangan

Total Nilai	Kelas	Klasifikasi Pengembangan
32 – 58	Kelas A	Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah
59 – 83	Kelas B	Kemampuan Pengembangan Rendah
84 – 109	Kelas C	Kemampuan Pengembangan Sedang
110 – 134	Kelas D	Kemampuan Pengembangan Cukup Tinggi
135 – 160	Kelas E	Kemampuan Pengembangan Tinggi

Berdasarkan hasil *overlay* dari 2 satuan kemampuan lahan yang telah dianalisis dan telah menjumlahkan total bobotnya, diperoleh hasil analisis

klasifikasi kemampuan pengembangan Kecamatan Sukatani sebagai berikut (lihat **Tabel 3**).

Tabel 3 Klasifikasi Kemampuan Pengembangan di Kecamatan Sukatani

No	Kelas	Klasifikasi Pengembangan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Kelas B	Kemampuan Pengembangan Rendah	735,98	9,31
2	Kelas D	Kemampuan Pengembangan Cukup Tinggi	4.045,22	51,18
3	Kelas E	Kemampuan Pengembangan Tinggi	3.121,87	39,50
Jumlah				100,00

Berdasarkan data hasil analisis di atas, Kecamatan Sukatani memiliki tiga klasifikasi kemampuan pengembangan yaitu kemampuan

pengembangan rendah, kemampuan pengembangan cukup tinggi, dan kemampuan pengembangan sangat tinggi. Dari tiga klasifikasi

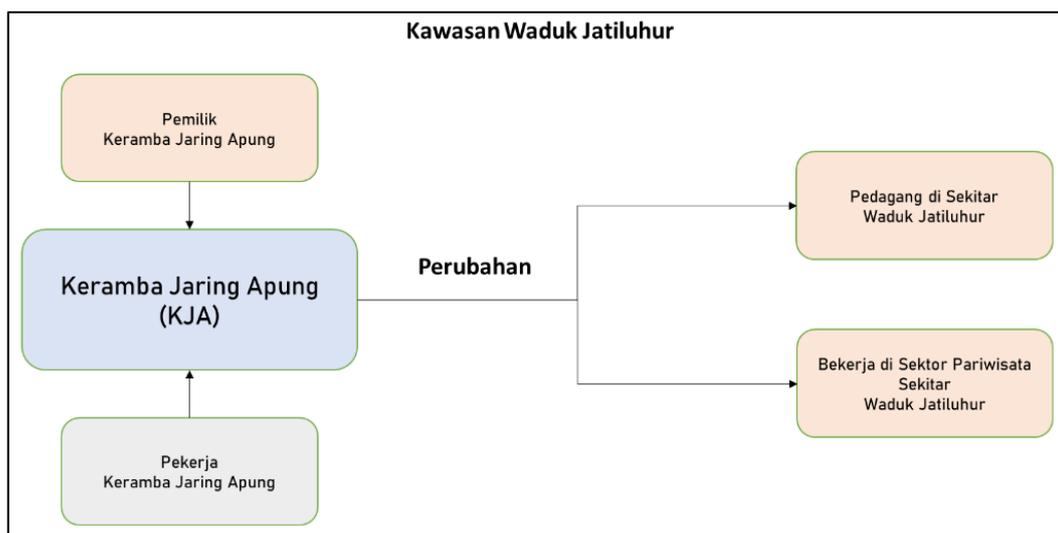
kemampuan pengembangan tersebut, yang paling dominan di Kecamatan Sukatani yaitu kawasan dengan kemampuan pengembangan cukup tinggi dengan luas 4.045,22 Ha dari total luas wilayah.

3.2 Analisis Pergeseran dan Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Sukatani

Satuan Tugas Citarum Harum secara bertahap dan berkelanjutan menertibkan keramba jaring apung (Keramba Jaring Apung (KJA)) yang ada di Waduk Jatiluhur. Pada tahun 2023, Satgas Citarum Pokja Pengolahan Sumber Daya Air dan Pariwisata bersama Sektor 14 dan Perum Jasa Tirta II serta Pemkab Purwakarta menertibkan Keramba Jaring Apung (KJA) di Bendungan Ir. H. Djuanda, salah satu objek vital nasional di Purwakarta. Penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) tersebut difokuskan di tiga zona yaitu Kecamatan Sukatani, Sukasari, dan Jatiluhur. Berdasarkan data terakhir di tiga zona tersebut terdapat 46.270 petak Keramba Jaring Apung (KJA). Sementara dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.31/2019

tentang Keramba Jaring Apung (KJA), jumlah ideal Keramba Jaring Apung (KJA) di Bendungan atau Waduk Jatiluhur sebanyak 11.306 petak Keramba Jaring Apung (KJA). Pada akhir tahun 2023, jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) yang ditargetkan ditertibkan maksimal 1.722 petak atau minimal 1.400 petak yang telah dilakukan sejak 28 November 2022. Sementara hingga 19 Desember 2022 capaian Keramba Jaring Apung (KJA) yang telah ditertibkan sebanyak 1.199 petak Keramba Jaring Apung (KJA). Pembongkaran menargetkan Keramba Jaring Apung (KJA) yang tidak mempunyai izin sama sekali.

Target penertiban Keramba Jaring Apung sebesar 1.814 unit. Dengan besaran 1.814 unit Keramba Jaring Apung yang di tertibkan, diasumsikan bahwa tiap petani memiliki 10 unit keramba jaring apung. Dengan demikian petani yang terdampak oleh penertiban keramba jaring apung yang melebihi kapasitas tampung berjumlah 182 petani. Hal tersebut perlu perhatian pemerintah agar dapat mempertimbangkan kemana masyarakat yang terdampak penertiban akan beralih profesi.



Gambar 1. Diagram Perubahan Mata Pencapaian Masyarakat Kecamatan Sukatani yang Terimbas Penertiban Keramba Jaring Apung (KJA)

Berdasarkan hasil Analisis Kemampuan Lahan Kecamatan Sukatani, diketahui bahwa Kecamatan Sukatani memiliki dominasi kemampuan pengembangan cukup tinggi dengan luas 4.045,22 Ha dari total luas wilayah. Dari hasil tersebut Kecamatan sukatani berpotensi untuk dapat mengarahkan petani yang terdampak untuk beralih profesi ke tempat yang mempunyai kemampuan lahan pengembangan tinggi. Salah satu opsi yang dapat dikembangkan menjadi peralihan para petani yang terdampak di Kecamatan Sukatani yaitu ke dalam sektor primer yaitu pertanian. Kecamatan Sukatani merupakan kecamatan dengan produksi padi yang cukup di Kabupaten Purwakarta. Luas pertanian padi Kecamatan Sukatani adalah 1.216

Ha. Desa Panyindangan merupakan Desa dengan luas pertanian terbesar yaitu 851 Ha, sedangkan Desa dengan luas pertanian terkecil adalah Desa Malangnengah seluas 105,5 Ha. Sedangkan luas pertanian desa yang lain, Desa Sindanglaya 807,5 Ha, Desa Tajursindang 565,5 Ha, Desa Cianting 548 Ha, Desa Sukatani 506 Ha, Desa Cipicung 457 Ha, Desa Pasirmunjul 408 Ha, Desa Sukamaju 397,5 Ha, Desa Cijantung 288 Ha, Desa Sukajaya 208 Ha, Desa Cianting Utara 180 Ha, Desa Cibodas 135 Ha, Desa Cilalawi 129 Ha.

Sedangkan untuk peralihan ke sektor sekunder atau pariwisata menjadi opsi lain selain pada sektor primer. Para nelayan dapat beralih profesi ke sektor pariwisata yang masih erat kaitannya dengan Waduk

Jatiluhur. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dan kuesioner yang telah dilakukan yang menunjukkan bahwa para petani yang terdampak penertiban Keramba Jaring Apung menunjukkan bahwa 31% menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat Kecamatan Sukatani mata pencahariannya tergantung pada Waduk Jatiluhur dan 39% menyatakan setuju bahwa masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi dengan Waduk Jatiluhur. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh para petani yang terdampak yaitu sebagai pegawai sektor pariwisata seperti pegawai hotel dan bungalow, bar dan restaurant, lapangan tenis, bilyard, perkemahan, kolam renang dengan water slide, ruang pertemuan, sarana rekreasi dan olahraga air, playground dan fasilitas lainnya Sarana olahraga dan rekreasi air misalnya mendayung, selancar angin, kapal pesiar, ski air, boating dan lainnya yang ada di Kecamatan Sukatani. Diperlukan kerjasama swasta dan pemerintah terkait penyediaan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata agar para petani yang

terdampak dapat beralih profesi menjadi para pegawai di sektor pariwisata sehingga para petani yang terdampak dapat mempunyai pekerjaan.

Terkait sektor tersier untuk peralihan petani yang terdampak penertiban keramba jaring apung dapat peralih atau berganti ke sektor perdagangan dan jasa disekitar wilayah waduk jatiluhur. Sektor tersier tersebut sangat potensial untuk dapat dijadikan peralihan mata pencaharian para petani. Pekerjaan yang dapat dilakukan para petani terdampak yaitu dengan berjualan disekitar keramba jaring apung seperti berjualan pakan untuk ikan, atau berdagang di sektor makanan atau berdagang souvenir sebagai pendukung sektor sekunder atau pariwisata yang ada di sekitar Waduk Jatiluhur.

3.3 Strategi Dampak Penertiban Keramba Jaring Apung Waduk Jatiluhur (Analisis SWOT)

- A. Identifikasi Faktor Internal Pengelolaan Keramba Jaring Apung Berkelanjutan di Waduk Jatiluhur

Tabel 4. Faktor Identifikasi Strategi Internal Dampak Penertiban Keramba Jaring Apung di Kecamatan Sukatani

No	Uraian	Bobot	Rating	Rating x Bobot
1	Kekuatan (<i>Strength</i>)			
a.	Penggerak perekonomian di sekitar Waduk Jatiluhur tidak hanya pada petani keramba jaring apung, melainkan pada sektor pekerja/buruh di tempat wisata sekitar Waduk Jatiluhur dan jasa perdagangan di sekitar Waduk Jatiluhur	0.125	4	0.5
b.	Keberadaan Waduk Jatiluhur membuat pendapatan masyarakat di Kecamatan Sukatani menjadi lebih baik	0.125	3	0.37
c.	Waduk Jatiluhur memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar	0.093	4	0.37
d.	Kecamatan Sukatani cocok untuk dikembangkan menjadi Kawasan Budidaya	0.156	4	0.62
Jumlah (I)				1.86
2	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)			
a.	Masih bertumpunya pencaharian masyarakat pada Keramba Jaring Apung	0.1	-5	-0.5
b.	Daya dukung waduk sudah terbatas untuk kegiatan budidaya ikan pada keramba jaring apung	0.133	-4	-0.53
c.	Sebagian masyarakat belum siap beralih profesi ke bidang atau sektor lain diluar Keramba Jaring Apung	0.166	-4	-0.66
d.	Belum ada solusi dari pemerintah terkait permasalahan dampak penertiban Keramba Jaring Apung	0.1	-3	-0.3
Jumlah (II)				-1,99
Y= Jumlah (I) – Jumlah (II)				-0,13

Berdasarkan **Tabel 4** di atas, diketahui bahwa di antara faktor-faktor strategi internal, faktor kekuatan yang paling besar adalah Kecamatan

Sukatani cocok untuk dikembangkan menjadi Kawasan Budidaya dengan skor 0.62. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi Kecamatan Sukatani memberi

pengaruh positif dampak yang ditimbulkan dari penertiban Keramba Jaring Apung di Waduk Jatiluhur. Oleh karena itu, hal tersebut perlu dimanfaatkan oleh para petani yang terdampak penertiban Keramba Jaring Apung dan dioptimalkan agar tetap menjadi kekuatan bagi petani yang terdampak penertiban. Pada faktor kelemahan yang paling tinggi adalah sebagian masyarakat belum siap

beralih profesi ke bidang atau sektor lain diluar Keramba Jaring Apung dengan skor 0.66. Kelemahan tersebut perlu diatasi dengan bantuan pemerintah dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan diluar Keramba Jaring Apung.

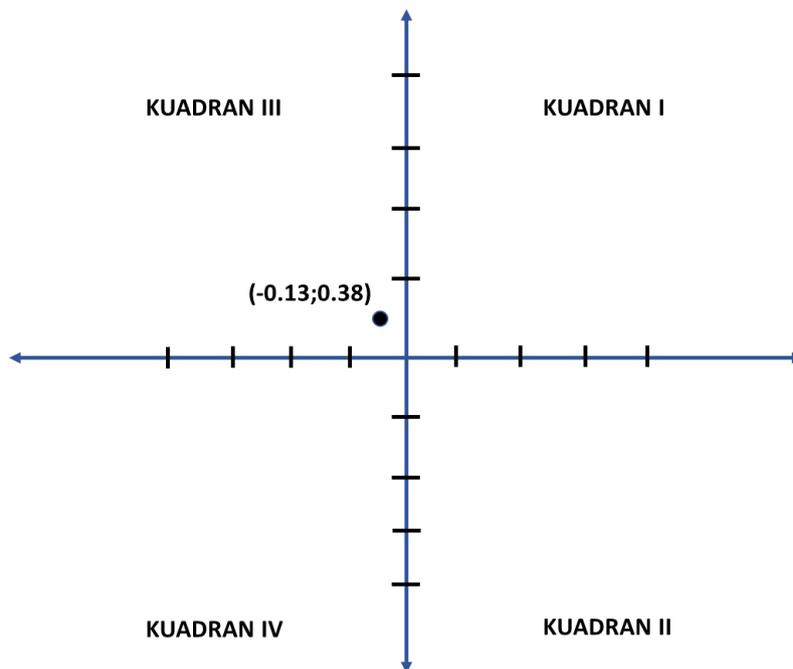
B. Identifikasi Faktor Eksternal Pengelolaan Keramba Jaring Apung Berkelanjutan di Waduk Jatiluhur

Tabel 5. Faktor Identifikasi Strategi Internal Dampak Penertiban Keramba Jaring Apung di Kecamatan Sukatani

No	Uraian	Bobot	Rating	Rating x Bobot
1	Peluang (<i>Opportunities</i>)			
a.	Pendapatan masyarakat di sekitar waduk dapat meningkat.	5	0,156	0,78
b.	Aspek ekonomi budidaya di Sekitar Keramba Jaring Apung menguntungkan masyarakat Kecamatan Sukatani	4	0,125	0,5
c.	kesesuaian kawasan peruntukan pertanian potensial dijadikan sebagai sektor peralihan dari Keramba Jaring Apung	3	0,09375	0,28
d.	Sektor Sekunder dan Sektor Tersier di sekitar Waduk Jatiluhur dapat menjadi solusi peralihan mata pencaharian petani yang terdampak penertiban Keramba Jaring Apung	5	0,125	0,62
Jumlah (III)				2.18
2	Ancaman (<i>Threats</i>)			
a.	Hilangnya mata pencaharian petani Keramba Jaring Apung (KJA) akibat penertiban (<i>over capacity</i>)	0.18	-4	-0,72
b.	Tidak mempunya para petani beralih profesi ke sektor lain dikarenakan keterbatasan pendanaan atau modal	0,136	-4	-0,54
c.	Tidak tertatanya kawasan sekitar Waduk Jatiluhur akibat peralihan/pergeseran mata pencaharian masyarakat ke sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata.	0.09	-3	-0,27
d.	Kurangnya penegakan regulasi RTRW untuk pengembangan budidaya perikanan	0,09	-3	-0,27
Jumlah (II)				-1.8
Y= Jumlah (III) – Jumlah (IV)				0.38

Berdasarkan **Tabel 5** di atas, diketahui bahwa faktor-faktor strategi eksternal, dimana faktor peluang paling besar adalah Pendapatan masyarakat di sekitar waduk dapat meningkat dengan skor 0,78. Hal tersebut perlu di manfaatkan dan dioptimalkan agar dapat terus berdampak positif bagi pendapatan masyarakat di sekitar Waduk Jatiluhur. Sedangkan faktor ancaman yang paling tinggi adalah hilangnya mata pencaharian petani Keramba Jaring Apung (KJA) akibat penertiban (over

capacity) dengan skor 0.72. Kedepannya hal tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat agar memberikan solusi terkait dampak penertiban Keramba Jaring Apung sehingga tidak membuat para petani yang terdampak kehilangan mata pencaharian mereka. Hasil analisis matriks IFE dan EFE dapat diketahui bahwa posisi internal dan eksternal Dampak Penertiban Keramba Jaring Apung di Kecamatan Sukatani berada pada posisi Kuadran III (-0.13; 0.38).



Gambar 2. Grafik Kuadran SWOT

Tersusunnya matriks EFE dan IFE di atas kemudian dirangkum dalam matriks SWOT untuk memberikan

rumusan alternatif yang sesuai bagi kondisi fisik. Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi para petani terdampak penertiban Keramba Jaring Apung dapat disesuaikan dengan

kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Penyusunan rumusan strategi masing-masing faktor matriks IFE dan EFE dalam matriks SWOT.

IFE	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
EFE		
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Strategi SO	Strategi WO
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan kawasan budidaya di Kecamatan Sukatani untuk menempatkan para petani yang terdampak penertiban agar mendapat pekerjaan baru. 2. Optimalisasi sektor sekunder dan tersier bagi para petani terdampak penertiban Keramba Jaring Apung seperti dalam sektor pariwisata dan perdagangan dan jasa disekitar Waduk Jatiluhur. 3. Pemanfaatan sektor primer (pertanian) yang dapat dijadikan opsi peralihan petani terdampak penertiban Keramba Jaring Apung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan kepada para petani terdampak penertiban untuk beralih profesi yang dapat menguntungkan dan memberikan nilai tambah dan pendapatan para petani; 2. Peningkatan kemampuan dalam sektor sekunder dan tersier agar para petani terdampak siap untuk beralih profesi dari petani menjadi profesi lainnya di bidang pariwisata dan perdagangan dan jasa; 3. Memberikan bantuan permodalan dan peralatan sesuai dengan kebutuhan petani yang terdampak dalam sektor pariwisata maupun sektor perdagangan dan jasa.
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi ST	Strategi WT
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran pemerintah setempat dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi para petani terdampak penertiban Keramba Jaring Apung; 2. Penerapan sistem penataan kawasan sekitar Waduk Jatiluhur guna mengantisipasi tidak membludaknya aktivitas ekonomi di sektor sekunder dan tersier; 3. Peningkatan sosialisasi terkait aturan RTRW Kabupaten Purwakarta dan peraturan Keramba Jaring Apung agar tidak ada kegiatan penertiban Keramba jaring apung yang berdampak pada mata pencaharian petani setempat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dengan kepada lembaga-lembaga pemerintah dan swasta dalam rangka mendukung permodalan kepada para petani terdampak penertiban; 2. Pembentukan asosiasi petani terdampak penertiban Keramba Jaring Apung dalam rangka mendapatkan dukungan bantuan teknis, dan bantuan non teknis dari institusi Perguruan Tinggi, Pemda, Dinas Teknis, dan Perbankan;

4. KESIMPULAN

1. Kesimpulan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah Kecamatan Sukatani

a. Ditinjau dari kesesuaian lahan di Kecamatan Sukatani, berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan didapat kesimpulan bahwa Kecamatan Sukatani cocok untuk dikembangkan menjadi Kawasan Budidaya.

b. Hasil analisis kemampuan pengembangan lahan diperoleh dominasi kemampuan pengembangan Sedang dengan persentasi luasan sebesar 51,18% atau 4.045,22 Ha berada pada daerah pesisir waduk, kemudian kemampuan pengembangan cukup tinggi dengan persentasi luasan 39,50% berada pada kawasan pegunungan atau perbukitan, sementara kemampuan pengembangan rendah hingga ke sangat rendah terkesan kecil yaitu dengan total luasan persentasi sebesar 9,31%.

c. Dari hasil analisis daya dukung daya tampung lahan yang dilakukan untuk lahan peralihan para petani Keramba Jaring Apung yang terdampak penertiban oleh pemerintah dapat atau cocok digunakan untuk lahan budidaya.

2. Kesimpulan pergeseran mata pencaharian masyarakat yang terdampak penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatiluhur

a. Perubahan mata pencaharian atau biasa disebut transformasi pekerjaan adalah pergeseran atau perubahan dalam hal mata pencaharian. Perubahan mata pencaharian ini juga dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sukatani khususnya para petani Keramba Jaring Apung (KJA) yang terimbas penertiban Keramba Jaring Apung (KJA). Perubahan mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor lain sebagai perubahan sosial atau gejala sosial.

- b. Pergeseran mata pencaharian para petani Keramba Jaring Apung (KJA) merupakan imbas dari proses penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) oleh pemerintah karena dianggap melanggar dan melebihi kapasitas tampung. Adanya penolakan atau protes dari sebagian para petani yang diwawancarai dan menganggap bahwa proses penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) tidak adil khususnya untuk masyarakat lokal yang mempunyai Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatiluhur. Penertiban yang dilakukan harusnya menasar pada Keramba Jaring Apung (KJA) yang dikelola oleh masyarakat luar Kabupaten Purwakarta yang sudah tidak aktif beroperasi
- c. Pembongkaran Keramba Jaring Apung (KJA) ini sangat berdampak pada penghasilan yang didapat

oleh petani. Pembongkaran memang dilakukan tidak semua petak keramba yang miliki, tetapi tetap imbasnya terhadap pendapatan para petani pastinya akan menurun. Para petani yang hanya mempunyai satu atau dua petak dan terkena pembongkaran akan kehilangan pekerjaannya dan mereka belum tahu akan bekerja pada bidang apa.

- d. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara di lapangan diperoleh bahwa para petani berpendapat dengan keberadaan Waduk Jatiluhur pendapatan menjadi lebih baik, Waduk Jatiluhur memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar, banyak masyarakat beralih profesi pekerjaan yang erat kaitannya dengan Waduk Jatiluhur dalam hal ini kegiatan budidaya ikan dengan keramba jaring apung, pekerja/buruh di tempat wisata sekitar Waduk Jatiluhur dan jasa

perdagangan di sekitar Waduk Jatiluhur.

3. Berdasarkan hasil analisis SWOT dengan matriks IFE dan EFE dapat diketahui bahwa posisi internal dan eksternal Dampak Penertiban Keramba Jaring Apung di Kecamatan Sukatani berada pada posisi Kuadran III (-0.13; 0.38) dengan implementasi strategi WO dan kondisi ini merupakan kondisi yang merekomendasikan mengubah strategi atau merubah kondisi saat ini. Dampak penertiban Keramba Jaring Apung di Kecamatan Sukatani memiliki peluang dan kelemahan sehingga perlu tindakan dengan meminimalkan kelemahan serta ancaman- ancaman sekaligus memaksimalkan kekuatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Kusumah, S., Amaliah, I., & Noviani. (2018). Eksternalitas Waduk Jatiluhur Bagi Masyarakat Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. *Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba (Spesia) Prosiding Ilmu Ekonomi*, 4(1), 51–54.
- Bintarto, R. (1977). Potensi Desa 2014. *Dinas Komunikasi Denpasar*.
- Castelletti, A., Pianosi, F., & Soncini-Sessa, R. (2008). Water Reservoir Control Under Economic, Social And Environmental Constraints. *Automatica*, 44(6). <https://doi.org/10.1016/j.automatica.2008.03.003>
- Deswati, R. H., & Adrison, V. (2019). Eksternalitas Produksi Keramba Jaring Apung Waduk Jatiluhur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 19(1).
- Fasa, A. S., Identifikasi Kebutuhan Perumahan Terhadap Daya Dukung Lahan di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. *GEOPLANART*, 2(1), 1-10.
- Fitri, N., Hidayat, A. H., & Gandhi, P. (2017). Daya Dukung Lingkungan Dan Kelembagaan Usaha Keramba Jaring Apung (Keramba Jaring Apung (Kja)) Di Waduk Jatiluhur. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 3(3), 248. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.V3i3.16257>
- Indratin, I., & Budihardjo, M. A. (2020). Sebaran Residu Insektisida Parathion Pada Lahan Pertanian Bawang Merah Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. *Seminar Nasional Lahan*

- Ismail, A. (2016). Nilai Manfaat Ekonomi Dan Pengelolaan Waduk(Studi Kasus Waduk Ir. H.Juanda). *Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah, 1*.
- Kartana, T. J., Apriyani, D., & Kurniawan, B. (2015). Strategi Pengelolaan Terpadu Waduk Sebagai Kawasan Agrohidroekowisata Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan. *Oseatek, 9*(01).
- Krisanti, M. (2006). Permasalahan Dan Strategi Pengelolaan Perairan Waduk: Contoh Kasus Waduk Jatiluhur Dan Waduk Cirata Jawa Barat. In *Kumpulan Makalah Tidak Dipublikasikan Tahun 2004 Sampai Dengan 2005*.
- Kurniasari, N., Apriliani, T., Koeshendrajana, S., & Wijaya, R. A. (2020). Risiko Sosial Penertiban Keramba Jaring Apung Di Waduk Jatiluhur. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 1*(1). <https://doi.org/10.15578/jsekp.v1i1.8363>
- Napier, T. L., Carter, M. V., & Bryant, E. G. (1986). Local Perceptions Of Reservoir Impacts: A Test Of Vested Interests. *American Journal Of Community Psychology, 14*(1). <https://doi.org/10.1007/Bf00923248>
- Nastiti, A. S., Krismono, K., & Kartamihardja, E. S. (2017). Dampak Budi Daya Ikan Dalam Keramba Jaring Apung Terhadap Peningk,Atan Unsur N Dan P Di Perairan Waduk Saguling, Girata, Dan Jatiluhur. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, 7*(2). <https://doi.org/10.15578/jppi.7.2.2001.22-30>
- Notohadiprawiro, T. (2006). Tanah Dan Lingkungan Tejoyuwono Notohadiprawiro. *Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada*.
- Sofiana, S., Solichin, A., & Wijayanto, D. (2016). Valuasi Ekonomi Manfaat Langsung Dan Tidak Langsung Kawasan Waduk Malahayu, Kabupaten Brebes. *Management Of Aquatic Resources Journal (Maquares), 5*(3). <https://doi.org/10.14710/marj.v5i3.14398>
- Supartono, Ashar, K., & Affandi, M. (2011). Analisis Pengaruh Variabel Sosial Ekonomi Masyarakat Urban Terhadap Kemandirian Ekonomi Ditinjau Dari Aspek Keuangan, Energi, Dan Pangan Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Journal Of Indonesian Applied Economics, 5*(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jia.e.2011.005.01.8>
- Ludtke, R. L., & Burdge, R. J. (1970). *Evaluation Of The Social Impact Of Reservoir Construction On The Evaluation Of The Social Impact Of Reservoir Construction On The Residential Plans Of Displaced Persons In Kentucky And Ohio Residential Plans Of Displaced Persons In Kentucky And Ohio*. https://uknowledge.uky.edu/Kwrii_Reports

Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H.
(2019). Perencanaan Dalam
Pengembangan Pariwisata Di

Kabupaten Pekalongan.
Conference On, 01